

**POTRET RASA KEBANGSAAN DI WILAYAH PERBATASAN  
INDONESIA-MALAYSIA: KASUS DESA LONG NAWANG MALINAU  
DAN KRAYAN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA<sup>1</sup>**

***NATIONHOOD IN BORDER AREA OF INDONESIA-MALAYSIA: CASES  
OF LONG NAWANG MALINAU AND KRAYAN NUNUKAN VILLAGE IN  
NORTH KALIMANTAN***

**Syafuan Rozi**

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta  
E-mail: syafuanrozi@yahoo.com.sg, syaf004@lipi.go.id  
Diterima: 4 Maret 2014; direvisi: 23 Mei 2014; disetujui: 27 Juni 2014

***Abstract***

*The presumption that a sense of nationalism in border communities is fragile is not entirely wrong, but also not entirely correct. Many factors that cause a sense of nationalism border communities strong or otherwise, weak. The state has an important role in growing and maintaining a sense of nationality communities across the country, especially in border areas. This paper presents a portrait of a sense of nationhood in the comprehension and daily life of border communities. At the end, this paper is trying to give some recommendation to the government and another stakeholders, about how to create a good approach to build nationhood in a border communities which more civilized and humanist.*

**Keywords:** *Nationhood/nationalism, Border Land, Government Role.*

**Abstrak**

Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuh tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan menjadi kuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat di seluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan ini menyajikan potret rasa kebangsaan dalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya, tulisan ini ingin memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwa pendekatan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatif dan humanis serta beradab.

**Kata Kunci:** kebangsaan, wilayah perbatasan, peran pemerintah.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan *summary* yang ditulis oleh Syafuan Rozi dari hasil penelitian Tim Nasionalisme P2P LIPI tahun 2013 dengan tema besar *Eksistensi Kebangsaan dan Keindonesiaan di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia: Kasus Kalimantan Utara* dengan tim peneliti terdiri dari: Firman Noor (koordinator), Syafuan Rozi, Nina Andriana, Asvi Warman Adam, Mochtar Pabottingi dan (Alm.) Muridan S Widjojo. Ucapan terima kasih kepada semua pihak dan narasumber yang menjadi inspirasi dan sumber data dari tulisan ini.

**“Jika dalam waktu 5 tahun tidak ada perbaikan jalan ke Krayan, Jangan salahkan kami jika patok batas berpindah ke Malaysia”.**

*(Pernyataan Ketua Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan, Long Bawan, Nunukan 2013)*

## **Pendahuluan**

Bukanlah hal yang mudah untuk tidak menggunakan emosi dalam menggambarkan apa dan bagaimana terjadinya pasang surut dan krisis rasa kebangsaan warga Indonesia di perbatasan. Fakta bahwa kondisi warga “kita” di perbatasan Indonesia yang masih jauh tertinggal kondisi infrastruktur dan pelayanan publiknya,<sup>2</sup> dibandingkan dengan Sabah Serawak. Sementara itu, warga perbatasan Malaysia, tampak kian maju dalam derap pembangunan fisik dan pelayanan publik serta perekonomiannya. Ketimpangan itu telah menggerus rasa kebangsaan warga kita menjadi tipis seperti lapisan ari kulit bawang.

Sementara itu, pihak kerajaan Malaysia terus berpacu dalam *Politik Unifikasi*, Satu Malaysia, membangun daerah ‘sempadannya’ di Serawak dengan bantuan kredit bank untuk pengolahan perkebunan, skema bantuan pendidikan dan subsidi barang kebutuhan pokok (Gas, BBM, gula, dan sebagainya). Namun di perbatasan kita, masih dalam pembentukan ‘Badan Pengelola Perbatasan’, pulangnya dokter PTT, perpustakaan tanpa buku, penerbangan oleh misionaris dan swasta. Upacara bendera dan pengajaran semangat kebangsaan di sekolah untuk menghidupkan wacana NKRI Harga Mati dan ‘bersatu itu indah’. Mata uang yang lebih banyak digunakan adalah Ringgit daripada Rupiah.

Ada rasa sedih dan kecewa ketika bertanya adakah kehadiran negara dan bangsa di perbatasan Long Nawang, Kabupaten Malinau, dan di Krayan, Kabupaten Nunukan di perbatasan antara Kalimantan Utara (Kaltara) dan Malaysia kepada Pastor Frans Uksolteja, Lah Bilong, Wilson Ului, dan Kueng Jalung. Empat pejabat

---

<sup>2</sup> Kondisi infrastruktur di perbatasan yang mesti dikembangkan adalah menjadikan perbatasan Long Nawang dan Krayan sebagai etalase pembangunan. Etalase itu antara lain terbangunnya pasar modern, jalan yang bagus, listrik dan air bersih, rumah sakit terbaik, bandara yang bisa didarati oleh pesawat berukuran menengah.

pemerintah desa di Long Betaoh dan Long Nawang ini tetap cinta dan optimis berada di dalam Rumah Kebangsaan kita walaupun dengan kondisi sangat terbatas dengan harga barang yang serba mahal.

Betapa perlu adanya rasa empati negara dan bangsa Indonesia kepada Ketua Adat Besar Krayan, berinisial YB dan warganya di Long Bawan, Nunukan Darat, yang memberikan peringatan dini tentang kemungkinan berpindahnya patok-patok perbatasan Long Bawan menjadi bagian Malaysia. Ketika terabaikan, berpuluh tahun berkubang dalam lumpur keterisoliran dari “Indonesia” karena buruknya konektivitas ke batas negeri kita tersebut. Juga kepada narasumber berinisial “BTM” yang mengancam akan mengusir seluruh transmigran dari wilayahnya.

Selain itu, terhadap kerabat Kerajaan Bulungan yang hingga kini masih terus hidup bersama “noda hitam” yang masih terus melekat dari masa “Konfrontasi” di bawah Demokrasi Terpimpin, tanpa upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi. Juga salut kepada Awang Dampit, tokoh masyarakat Dayak yang mengambil inisiatif membangun jalan (dengan alat-alat berat berat yang didatangkannya sendiri) sejak dari Long Midang di Kabupaten Nunukan menuju Ba’ Kelalan di wilayah Malaysia. Warga lokal lebih hadir di perbatasan, ketimbang sosok negara menjadi agen pembangunan.

Hubungan benci tapi rindu terasa hadir dalam opini narasumber kepada kami peneliti nasionalisme di perbatasan. Sebagian warga di tapal batas menyatakan walaupun mereka hidup terbatas tetap saja mereka cinta kepada Indonesia. Ada ungkapan ‘Garuda’ (kebangsaan Indonesia) di dada ku, walaupun harimau (ekonomi Malaysia) di perutku. Negeri para leluhurnya, sebelum Indonesia atau Malaysia itu ada. Namun, sebagian lagi sikap nasionalismenya cenderung menipis untuk pindah warga negara dan sebagian lagi hidup bersandiwara dengan dua identitas warga negara sesuai keperluan pragmatis dalam kehidupan. Pernyataan keras akan berpindahnya tapal batas dan hadirnya bendera, tampaknya bukan sikap separatis yang radikal karena tidak membangun kekuatan bersenjata. Ekspresi itu

lahir agar negara dan bangsa Indonesia memberi perhatian kepada warga kita di perbatasan.

### **Potret Perbatasan yang ‘Serba Terbatas’**

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan mencakup garis batas yang demikian panjang. Dalam konteks perbatasan darat, panjang garis perbatasan antara kedua negara berkisar 2.004 km atau 970 mil. Saat ini, berdasarkan UU yang telah ditetapkan ada tiga provinsi di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia (Serawak dan Sabah), yakni Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Dari ketiga wilayah itu terdapat 8 Kabupaten (Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Kutai Barat, Malinau dan Nunukan), dan 23 kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia. Hal yang paling terasa di perbatasan adalah jalan yang rusak, lebih mudah ke akses ke negara tetangga, ketimbang ke ibukota provinsi. Wilayah kita masih sulit dibangun karena perbedaan konsep tata ruang hijau, konservasi atau produktif, sehingga sangat terbatas yang bisa dibangun di perbatasan kita.

Kecenderungan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, peluang hidup yang lebih layak, dan berbagai kemudahan dan “kepedulian” yang kerap ditunjukkan oleh Malaysia dalam kurun waktu yang lama diyakini beberapa kalangan telah cukup menarik hati warga di sekitar perbatasan. Kondisi ini cukup memberikan “beban tersendiri” bagi penumbuhan dan pemeliharaan rasa kebangsaan. Penelitian LIPI mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia, hampir 20 tahun yang lalu, mengindikasikan bahwa masyarakat di perbatasan memiliki persepsi positif terhadap Malaysia, dalam makna bahwa mereka memandang negara jiran itu jauh lebih makmur dan sejahtera dan belum sebaliknya terhadap Nusantara.<sup>3</sup>

### **1. Kondisi Long Nawang Malinau**

Desa Long Nawang adalah bagian dari Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Desa ini terletak hanya sekitar 40 km dari perbatasan Indonesia-Malaysia. Desa yang termasuk wilayah yang kerap disebut sebagai Jantungnya Kalimantan (*the Heart of Borneo*), bukanlah tempat yang mudah untuk dituju. Tidak ada jalur darat yang memadai dan efisien menuju desa ini. Dipagari oleh alam, terutama rapatnya belantara hutan, Desa Long Nawang menjadi semacam *ghetto* yang tidak mudah ditembus melalui jalur darat. Jalur melalui sungai pun kerap memiliki kendala tersendiri. Seperti di wilayah Kalimantan lainnya, kendala itu terutama adalah ketidakpastian kondisi sungai. Jika kondisi sungai sedang ramah, yang menyebabkan ketinting (perahu kecil bermotor) dapat melaju di atas air, perjalanan ke pedalaman termasuk perbatasan dapat mudah dilakukan. Namun, saat air dangkal ataupun sebaliknya arus terlalu deras, perjalanan kerap harus ditunda atau dilanjutkan dengan amat tersendat. Di beberapa kasus, sebagian orang harus menunggu beberapa hari hingga kondisi sungai benar-benar kondusif untuk dapat dilalui.

Dengan pelbagai kondisi tersebut, jalur udara menjadi sebuah pilihan alternatif yang relatif mampu mengatasi halangan hutan dan ketidakpastian arus sungai. Namun, jalur udara itu sesungguhnya juga tidak mudah. Tingkat kepastian ketersediaan penerbangan masih relatif belum memadai mengingat terbatasnya jumlah armada pesawat. Hal ini ditambah dengan minimnya kapasitas penumpang yang dapat diangkut, dimana tidak lebih dari 10 orang saja yang dapat dilayani dalam sekali penerbangan. Belum lagi persoalan cuaca yang kerap kurang bersahabat yang mengganggu jadwal penerbangan.

<sup>3</sup> Lihat Ratna Indrawasih, Asfar Marzuki, Soewarsono, Sukri Abdurrachman, *Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Desa Entikong-Kalimantan Barat dan Pulau Nunukan-Kalimantan Timur* (Jakarta: PMB-LIPI, 1996), hlm. 92.



Sumber: Dokumentasi Pribadi.

**Gambar 1.** Tugu Peringatan kemerdekaan Desa Long Nawang, Malinau

Untuk mencapai wilayah Desa Long Nawang melalui jalur udara, penumpang dapat langsung menuju bandara kecil atau perintis di Long Nawang— atau dapat pula melalui bandara kecil di Desa Long Ampung – yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan mobil selama kurang lebih satu jam atau sepeda motor selama kurang lebih dua jam. Jalan menuju perbatasan yang masih belum beraspal, dan di beberapa tempat masih rusak, dengan medan yang naik turun (kadang cukup curam), menyebabkan pengemudi kendaraan harus ekstra hati-hati jika akan menuju ke sana.

Desa Long Nawang memiliki cerita yang cukup panjang. Desa ini dipercaya telah ada sebelum republik ini lahir. Wilayah Long Nawang yang masuk dalam daerah yang dikenal sebagai Apau Kayan, bahkan diyakini telah menjadi salah satu titik penting dari pola hidup berpindah masyarakat Dayak Kenyah sejak tahun 1600-an.<sup>4</sup> Jauh sebelum kemerdekaan, Desa Long Nawang adalah pusat dari masyarakat Dayak, terutama Dayak Kenyah, setidaknya untuk wilayah Kalimantan Utara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kuburan-kuburan tua, tempat bersemayamnya tokoh-tokoh Dayak Kenyah

di masa lalu. Salah satunya adalah kuburan dari tokoh Dayak bernama Lancau Ingan, yang terletak di kompleks Bandara Long Nawang. Lancau Ingan diyakini oleh warga setempat sebagai raja besar yang merupakan keturunan raja-raja Dayak. Wilayah kekuasaannya demikian luas mencakup wilayah yang saat ini berada di Indonesia dan Malaysia. Saat ini keturunan Lancau Ingan sebagian masih ada di desa Long Nawang, sebagiannya lagi telah migrasi ke banyak daerah, termasuk ke Malaysia.

## 2. Kondisi Krayan Nunukan Daratan

Krayan merupakan sebuah kecamatan perbatasan yang masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kecamatan ini terletak wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Batas itu ada di Desa Long Midang dan tetangganya Ba' Kelalan, wilayah Serawak Malyasia Timur. Kecamatan Krayan mempunyai luas wilayah sekitar 1.837,54 km<sup>2</sup> dengan penduduk tahun 2010, sebanyak 2.077 Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 4.271 perempuan dan 3.685 laki-laki.<sup>5</sup> Menurut Ketua Adat Dayak Lundayeh Krayan Yagung Bangau, wilayah Krayan mencakup 65 desa. Dahulu jumlah penduduknya sekitar 16.000

<sup>4</sup> Lihat Edi Sedyawati, dkk., *Konsep Tata Ruang Suku Bangsa Dayak Kenyah di Kalimantan Timur*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995), hlm.19.

<sup>5</sup> Lihat Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, *Kabupaten Nunukan dalam Angka*, (Nunukan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2010).

jiwa. Dalam perkembangannya sebanyak 8.438 jiwa yang tetap bertahan, selebihnya “merantau” ke Kuching, Miri, Kota Kinabalu, dan lain-lain. Sebagian dari mereka juga akhirnya memiliki IC (*Identity card*) Malaysia.<sup>6</sup>

Krayan hanya dapat dijangkau dengan pesawat udara berbadan kecil, yang kondisi angkutnya sangat terbatas. Belum ada jalan tembus darat yang nyaman untuk sampai ke sana. Untuk sampai ke ibukota kecamatan Krayan, Long Bawan, sarana transportasi udara sangat terbatas (maksimal 12 penumpang) dan mengantri tiket jauh sebelumnya karena menyangkut subsidi Pemda Nunukan. Pesawat yang ada pun seperti Susi Air dan MAF<sup>7</sup>, kerap lebih mengutamakan warga yang sakit keras dan kunjungan misionaris. Pesawat-pesawat itu pun tidak beroperasi setiap hari. Secara umum, berbeda dengan wilayah Kalimantan yang dapat dilalui oleh sungai atau jalan raya, posisi Krayan yang di pegunungan tidak dapat di tempuh dengan cara lazimnya dengan perahu. Sebagian masyarakat merasa tidak memiliki keterkaitan yang sungguh erat terhadap Indonesia. Bagi mereka Indonesia bukanlah segala-galanya, dalam makna fleksibilitas keberpihakan kebangsaan masih mungkin terjadi. Sikap ini tercermin, misalnya, salah satunya dapat dilihat dari produk topi Adat Dayak Lundayeh yang dibuat oleh Warga Krayan.



Sumber: Koleksi Mitchell Lawa Bungan Danil, Rong & Tayen, 2010.

**Gambar 2.** Topi Adat Dayak Lundayeh, Krayan, Nunukan Daratan

Warna topi adat ini memang berwarna Merah Putih. Namun, selembar atau sehelai kain yang membentang di atas topi-topi tersebut justru bertuliskan “*I Love Ba’Kelalan*”. Ba’Kelalan, adalah kota terdekat dengan Krayan yang merupakan wilayah Serawak, Malaysia Timur. Keberadaan topi ini seolah menunjukkan adanya dualisme identitas diri pada penduduk Krayan. Kecintaan mereka pada Indonesia tampak sama beratnya dengan kecintaan mereka pada Ba’Kelalan, yang *notabene* merupakan bagian dari Malaysia.

Untuk pulang kampung ke Krayan, mereka yang tidak dapat memperoleh tiket pesawat terpaksa kerap harus masuk ke wilayah Tawau, Malaysia terlebih dahulu, kemudian baru naik bus melalui jalan darat menuju Miri (perbatasan Malaysia-Brunei Darussalam). Dari sana kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Ba’Kelalan Serawak, dengan bus atau jeep, lalu menyambung lagi dengan ojek atau jeep empat gardan melalui Long Midang atau Long Luyu untuk sampai ke kampungnya, Krayan. Ungkapan, pergi ke luar negeri dulu, baru pulang kampung, benar-benar terjadi di sini.

Penduduk asli Krayan adalah suku *Dayak Lundayeh*, umumnya beragama Kristen Katolik, Protestan dan Kaharingan. Di wilayah itu juga terdapat pendatang yang berasal dari berbagai suku seperti, Jawa, Toraja, Batak, Kawanua,

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ketua Adat Krayan, berinisial YB, di Krayan, 29 Juni 2013.

<sup>7</sup> Pesawat MAF (*Missionary Aviation Fellowship*) hampir semuanya dikemudikan oleh pilot asing seperti Amerika Serikat, Inggris atau Kanada yang bekerja sebagai semacam *volunteer*. Tanpa adanya pesawat MAF atau Susi Air itu maka dapat dikatakan tidak ada angkutan ke wilayah NKRI di perbatasan Krayan dan daerah ini akan selamanya terpencil.

Bugis-Makasar, atau Wajo. Profesi atau pekerjaan sebagian besar penduduk Krayan adalah petani, pengrajin garam, peternak, peramu hasil hutan, guru, rohaniwan, sopir, tukang ojek dan pedagang sembako.<sup>8</sup>

Penduduk Indonesia di dataran tinggi Krayan terdiri dari Suku Dayak Lundayeh. Kalau kita baru hadir seminggu di sana, secara selintas seolah tidak ada yang kurang dari kehidupan penduduknya. Rumahnya kebanyakan berbentuk rumah panggung seperti di Sumatera, berdiri kokoh dan megah dari bahan kayu dan beratap seng yang bermanfaat menahan panas di cuaca dingin. Beberapa rumah memiliki alat parabola di halaman depannya. Seolah-olah memamerkan, inilah rumah kami yang ada alat telekomunikasinya untuk menonton tayangan televisi Indonesia atau Malaysia.

### **Gaduh Kebangsaan di wilayah Perbatasan Darat Indonesia Malaysia**

Beberapa pertanyaan mendasar dalam kajian kami adalah: seberapa besar pemahaman masyarakat di perbatasan akan kebangsaan, dan seberapa besar nilai-nilai keindonesiaan itu hadir dalam keseharian kehidupan masyarakat di sana. Penelitian ini juga menelaah lebih dalam mengenai bagaimanakah upaya-upaya pemerintah dalam menghadirkan eksistensi nasional, dengan program-program kebangsaan, dan respons masyarakat atas upaya-upaya itu. Salah satu temuannya adalah terjadi semacam ‘gaduh kebangsaan’ di Krayan, Nunukan yang mengekspresikan kemungkinan berpindahnya tapal batas dan kewarganegaraan. Namun terjadi semacam ‘teduh kebangsaan’ di Long Nawang, Malinau. Meminta perhatian pusat dengan cara ‘berkata keras’, agar diperhatikan dan dimengerti.

Dalam pada itu, Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri merupakan wilayah kajian yang penting, mengingat pula ada dua kabupaten (Nunukan dan Malinau) yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Atas dasar ini, Kaltara jelas merupakan wilayah penelitian yang nampak tidak dapat dihindari manakala kita mengkaji pelbagai persoalan yang terkait

<sup>8</sup> Pendapat Ketua Adat Krayan, berinisial YB, di Krayan, 29 Juni 2013.

dengan perbatasan, termasuk yang terkait dengan masalah kebangsaan.

### **1. Eksistensi “Teduh Kebangsaan” di Long Nawang**

Persepsi masyarakat Long Nawang terhadap Indonesia dan kebangsaan tidak dapat dikatakan sederhana karena terpaksa bersikap mendua untuk bertahan hidup. Mengakui Indonesia, tapi tidak segan memiliki ID (KTP) Malaysia. Dalam konteks yang paling permukaan, Indonesia dipandang oleh masyarakat layaknya sebuah rumah atau bahkan jati diri. Dikatakan sebagai rumah, tak lain karena di wilayah itulah masyarakat Long Nawang melihatnya sebagai tempat bernaung, menjalani kehidupan hingga akhir hayat<sup>9</sup>. Dalam makna kejatidirian terbersit sebuah isyarat sebagai wilayah yang harus dipertahankan.

Sehubungan dengan itu, perangkat desa meyakini bahwa persoalan kebangsaan dalam makna kecintaan terhadap tanah air masyarakat perbatasan tidak perlu diragukan. Seorang pastor yang juga aparatur pemerintah di Desa Long Betaoh, desa paling dekat dengan Malaysia, misalnya, menyatakan bahwa tidak ada persoalan sama sekali dalam hal nasionalisme di wilayahnya.<sup>10</sup> Pandangan itu dikonfirmasi oleh Kepala Desa Long Betaoh Lah Bilong—yang meskipun amat kritis terhadap pemerintah sehubungan dengan masih minimnya kepedulian pemerintah pusat atas daerah yang dipimpinnya—menyatakan bahwa rasa kebangsaan masyarakat perbatasan di wilayah Desa Betaoh masih tetap dapat diandalkan<sup>11</sup>.

Pandangan nasionalisme mendua seperti lapis kulit bawang. Ada semangat keindonesiaan namun juga menyaru menjadi berkebangsaan Malaysia. Lagi pula, kedayakan atau keborneoan mereka lebih dulu hadir ketimbang *nation-state* Republik Indonesia atau Kerajaan Malaysia. Hal demikian itu disampaikan oleh Wilson Ului,

<sup>9</sup> Disarikan dari sejumlah hasil wawancara dengan beberapa responden di Desa Long Nawang, Malinau.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Frans Uktolseja, Pastor merangkap Kepala Urusan Pemerintahan Desa Long Betaoh, di Desa Long Betaoh, 5 Juni 2013.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Lah Bilong, Kepala Desa Long Betaoh, di Desa Long Betaoh, 5 Juni 2013.

Camat Kayan Hulu. Meski merupakan sosok baru di lingkungan pemerintahan Kayan Hulu, Wilson meyakini bahwa rasa kebangsaan seperti lapis bawang itu menjadi ciri khas di wilayah perbatasan. Dia merujuk, misalnya, pada masih tetap maraknya pelaksanaan Peringatan Hari Kemerdekaan di wilayah yang dipimpinnya. Kesemarakan itu melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat tanpa sebuah rekayasa. Dia menambahkan bahwa semua perwakilan dari setiap generasi hadir dalam upacara itu, tidak terkecuali mereka yang sudah berusia lanjut. Namun, beberapa warga untuk kemudahan pelayanan kesehatan, akses pendidikan juga memiliki *ID Card* Malaysia.<sup>12</sup>

Di tengah himpitan kemiskinan dan serba terbatas, masyarakat Desa Long Nawang memang tetap berupaya menyelenggarakan Peringatan Hari Kemerdekaan dengan semeriah mungkin. Kemeriahnya bahkan banyak dikatakan mengalahkan kemeriahan penyelenggaraan acara-acara keagamaan, termasuk Hari Natal. Menurut Kueng Jalung, saat memperingati Hari Kemerdekaan semua masyarakat berhenti berladang.<sup>13</sup> Momen acara peringatan kemerdekaan menjadi agenda tahunan masyarakat desa yang cukup dinanti, dan biasanya dirayakan hingga satu minggu lamanya. Acara-acara disiapkan oleh seluruh masyarakat dan menelan anggaran yang cukup banyak untuk ukuran masyarakat desa. Pada saat perayaan itu, Bendera Merah Putih berkibar di seluruh pelosok desa, menandai semacam rasa memiliki bangsa yang kuat.

Simbol bendera negara, Sang Merah Putih, tidak saja ada pada saat momen-momen perayaan hari-hari besar kenegaraan, namun pula pada hampir di setiap penyelenggaraan acara-acara desa, termasuk pesta rakyat. Bendera seolah telah menjadi bagian penting dari acara-acara tersebut. Bendera Merah Putih kerap ditemui pada saat acara-acara yang diselenggarakan oleh partai dan organisasi kepemudaan, termasuk pada *banner* atau spanduk yang menandai adanya kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut di

<sup>12</sup> Wawancara dengan Wilson Ului, Camat Kayan Hulu, di Desa Long Nawang, 4 Juni 2013.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kueng Jalung, Kepala Desa Long Nawang, di Desa Long Nawang, 4 Juni 2013.

Long Nawang. Simbol Merah Putih juga dapat ditemui di banyak bangunan, mulai di tempat musyawarah adat, bangunan-bangunan sederhana tempat masyarakat berkumpul lainnya, hingga bangunan reot di tempat-tempat terpencil.

Dalam bentuk yang lain, nasionalisme diekspresikan dengan adanya loyalitas. Terkait dengan itu, keberadaan negara tetangga yang jauh lebih makmur tidak mudah memicu terjadinya migrasi. Memang ada beberapa penduduk Long Nawang yang mencari nafkah di Malaysia tidak kembali lagi ke desanya. Dari awal tahun 1980-an hingga kini, sekitar 82 orang yang melakukan migrasi ke Malaysia menetap di sana dan dikabarkan telah menjadi warga negara Malaysia.<sup>14</sup> Namun demikian, jumlah mereka yang melakukan migrasi pertahun dari waktu ke waktu semakin mengecil. Menurut Kepala Desa Long Nawang dapat dikatakan saat ini sudah tidak pernah terjadi lagi peristiwa orang yang tidak kembali, apalagi sebuah eksodus. Menurut Kepala Desa, mereka yang beraktivitas dan mencari nafkah di Malaysia cenderung untuk kembali lagi ke tanah air<sup>15</sup>.

Sebagai perbandingan, di Desa Long Betaoh juga terbetik kisah yang cukup menarik. Pasca terjadinya konflik Indonesia-Malaysia di tahun 1962, ratusan KK warga desa pindah ke wilayah Malaysia meninggalkan sepertiga penduduk desa yang berjumlah puluhan.<sup>16</sup> Alasan yang dikemukakan oleh banyak kalangan adalah karena kemiskinan, kelaparan dan pendidikan yang buruk. Namun demikian, situasi tersebut sudah jarang terjadi dan saat ini dapat dikatakan tidak lagi terjadi.

Fenomena WNI dari Desa Long Nawang yang mengikuti pemilu pada saat Pemilihan Raya di Malaysia juga sudah hampir tidak pernah terjadi lagi saat ini.<sup>17</sup> Hal tersebut seiring dengan semakin ketatnya pihak Malaysia dalam mengontrol masyarakat pendatang dan semakin dipersulitnya proses untuk mendapatkan kartu

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Wawancara dengan Lah Bilong, Kepala Desa Long Betaoh, di Desa Long Betaoh, 5 Juni 2013.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kueng Jalung, Kepala Desa Long Nawang, di Desa Long Nawang, 4 Juni 2013.

identitas (*identity card/IC*) Malaysia. Sementara hanya mereka yang memiliki IC saja yang dapat memilih dalam pemilu. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan masih ada sebagian kecil warga RI di perbatasan, terutama yang bekerja di Malaysia, yang turut aktif berkampanye untuk partai-partai tertentu. Keaktifan itu bisa dimotivasi oleh rasa simpati atau memang dimobilisir oleh partai tertentu untuk mendapat imbalan uang.<sup>18</sup>

Hal yang pasti, menurut pengakuan beberapa kalangan untuk mengurus IC memang tidak semudah dulu. Jika dulu saat mendapat IC itu mudah, fenomena kewarganegaraan ganda amat jarang ditemui, apalagi saat ini yang jauh lebih sulit untuk bisa mendapat IC Malaysia. Minim atau tiadanya kewarganegaraan ganda merupakan “prestasi” lain bagi sebuah wilayah terpencil di perbatasan. Hal ini terutama mengingat bawah fenomena kewarganegaraan ganda seolah menjadi hal yang biasa di perbatasan Indonesia-Malaysia, termasuk misalnya di wilayah Krayan dan Nunukan.

Beberapa peristiwa di atas nampak mencerminkan situasi yang positif terhadap eksistensi rasa kebangsaan atau nasionalisme. Namun demikian, kajian lebih dalam akan menunjukkan beberapa hal menarik, yang menunjukkan bahwa adanya alasan-alasan praktis yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam masalah seputar kebangsaan. Pembahasan di bawah ini akan menunjukkan sisi lain dari persoalan kebangsaan di wilayah perbatasan. Wilayah Apau Kayan sempat pula menjadi bagian dari basis pergerakan separatis. Terkait dengan celah dalam soal kebangsaan tersebut, hal ini terutama berkenaan dengan pertanyaan bagaimanakah sebenarnya pemahaman atau wawasan masyarakat tentang Indonesia, yang kemudian terkait dengan persoalan persepsi mengenai Indonesia yang ada di benak masyarakat.

Kenyataannya adalah bahwa wawasan mengenai eksistensi atau makna keindonesiaan masih demikian terbatas. Hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat di sana mengenai Indonesia cukup menarik. Salah seorang

responden yakni siswa SDN 01 Long Nawang peringkat 1 di kelas 5 berinsial KWN, alias Nicke, menyatakan diri bangga menjadi warga Negara Indonesia. Dalam benaknya, Indonesia adalah negara yang bagus dan indah. Saat ditanya apakah dirinya akan pindah ke Malaysia, jika sudah besar nanti, dia dengan tegas menyatakan tidak<sup>19</sup>.

Dalam konteks pemahaman geografis, dia mampu menjawab letak desanya. Namun, demikian, yang menarik adalah manakala Nicke ditanya di pulau manakah letak desanya dia tidak mampu menjawabnya. Meski dia mengatakan dirinya tinggal di Kalimantan, tidak tampak sebuah keyakinan bahwa ada sebuah pulau yang disebut sebagai Kalimantan di wilayah tanah airnya. Hal ini terkonfirmasi dengan jawaban Nicke bahwa hanya ada dua pulau besar di Indonesia yakni Pulau Jawa dan Pulau Bali, ketika diminta untuk menjawab ada berapakah pulau terbesar di Indonesia.

Saat diminta menunjukkan letak Jakarta (Ibu Kota Negara) pada peta buta sederhana, dia meletakkan jarinya di bagian selatan Pulau Sumatera. Respons Nicke tersebut nampak menunjukkan sebuah keterasingan, tidak saja akan letak Jakarta, namun juga pulau-pulau yang ada pada peta tersebut.<sup>20</sup> Jawaban-jawaban Nicke tersebut secara hipotesis mengarahkan pada kemungkinan kesederhanaan jawabannya atas pertanyaan mengenai seberapa kaya bahasa dan suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia, berapa banyak jumlah pulau yang dimiliki oleh negaranya, termasuk seberapa luas wilayah yang dimiliki oleh negara kepulauan ini. Terbukti kemudian pada soal suku bangsa dia menyebutkan hanya ada 12 (dua belas) suku bangsa di Indonesia.

Dalam konteks pemahaman sejarah, Nicke memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai sosok Bung Karno, meski dia harus dibantu dengan penyebutan nama panjang tokoh proklamator berikut gelar kesarjanannya (Ir. Soekarno). Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa Bung Karno adalah tokoh proklamator dan presiden pertama RI. Namun yang unik adalah dia

<sup>19</sup> Wawancara dengan Nicke, seorang pelajar Sekolah Dasar, di Desa Long Nawang, 5 Juni 2013.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

tidak mengenal sama sekali sosok Bung Hatta. Nama tokoh kedua proklamator itu nampak demikian asing baginya.<sup>21</sup> Nicke menggelengkan kepala ketika nama Wakil Presiden pertama RI itu ditanyakan. Kondisi ini cukup memberikan kejutan, mengingat ke-dwitunggal-an tokoh ini menurut pemahaman rata-rata orang Indonesia. Bisa jadi momen detik-detik proklamasi yang dipahami atau sempat terekam dalam benak Nicke berbeda cukup jauh dari pemahaman yang coba ditularkan dari buku pelajaran sejarah standar. Apa pun alasan dibalik kenyataan ini, jawaban Nicke kembali membawa pada sebuah hipotesis mengenai keterbatasan jawaban dirinya atas pelbagai pertanyaan seputar nama-nama tokoh pahlawan sekaligus momen-momen bersejarah bangsa ini.

Dapat dibayangkan bahwa untuk anak *sekolahan* dengan peringkat terbaik di kelasnya saja berbagai pertanyaan mendasar itu demikian sulit untuk dijawab, apa lagi dengan mereka yang berada di peringkat jauh dibawahnya. Situasi bisa jadi semakin buruk pada mereka yang sama sekali tidak bersekolah. Padahal secara umum persentase mereka yang tidak bersekolah atau lulus SD di Long Nawang cukup tinggi. Di seluruh Kabupaten Malinau jumlah mereka termasuk dalam kategori ini memang cukup tinggi yakni 42,15% dari total jumlah penduduk<sup>22</sup>.

Lepas dari persentase mereka yang tidak bersekolah, masyarakat Long Nawang nampak yakin bahwa mereka yang bersekolah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar wawasan kebangsaan. Persepsi masyarakat sedemikian terkonfirmasi saat penulis berupaya mendapatkan jawaban dari seorang pemuda seputar wawasan kebangsaan. Pemuda tersebut dengan bersikeras mengatakan janganlah dirinya ditanyakan hal-hal semacam itu, karena dia tidak memahami sama sekali pertanyaan apalagi jawabannya.<sup>23</sup> Pertanyaan-pertanyaan seputar

nama tokoh pahlawan ataupun momen bersejarah hingga letak geografis dianggap cukup berat oleh pemuda itu yang mengaku tidak sempat bersekolah.

Beberapa pemuda dengan latar belakang pendidikan yang sama hanya melemparkan senyum untuk kemudian mengatakan “tidak tahu”, atas pertanyaan seputar kebangsaan yang diajukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa jawaban atau respons yang diberikan atas pertanyaan seputar wawasan kebangsaan cukup memperlihatkan adanya jarak antara mereka yang bersekolah atau tidak. Juga secara umum memperlihatkan pula adanya jarak pemahaman antara mereka yang hidup di perbatasan dengan hakikat jati diri dan sejarah bangsanya.

Situasi yang ada pada Nicke dan beberapa pemuda yang sempat ditemui saat penelitian ini berlangsung tentu saja tidak dapat digeneralisir. Kesimpulan bahwa akan demikianlah jawaban seluruh anak seusianya atau masyarakat perbatasan pada umumnya manakala ditanyakan soal-soal wawasan kebangsaan jelas terburu-buru. Tetap saja terbuka kemungkinan kondisi anomali, yang menunjukkan sisi lain yang berlawanan dengan hasil penelitian sederhana yang dilakukan oleh tim ini. Di samping itu, bagi sebagian kalangan, fenomena rendahnya wawasan kebangsaan itu sebetulnya tidak khas perbatasan, dan dalam praktiknya tidak juga dapat dijadikan barometer untuk mengukur rasa kebangsaan.

Meski bersepakat dengan pandangan-pandangan tersebut, penulis melihat bahwa temuan lapangan ini tetap tidak dapat diabaikan. Temuan itu tetap dapat menjadi semacam rujukan, meski sederhana, mengenai kondisi wawasan kebangsaan di perbatasan. Lebih dari itu, kondisi ini walau bagaimana pun adalah peringatan, yang harusnya dapat memunculkan *sense of emergency* terkait dengan pemeliharaan persepsi dan rasa kebangsaan. Karena bisa jadi saat ini memang diperlukan upaya yang lebih keras lagi dalam membangunnya. Dengan persepsi warga perbatasan yang demikian terbatas mengenai tanah airnya, tentu tidak mudah untuk membentuk sebuah bangunan kebangsaan yang tumbuh dengan subur dan kuat di wilayah itu.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Bappeda Kabupaten Malinau dan BPS Kabupaten Malinau, *Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau 2012*, (Malinau: Bappeda Kabupaten Malinau dan BPS Kabupaten Malinau, 2012), hlm. 21.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ngah, Warga Desa Long Nawang, di Desa Long Nawang, 5 Juni 2013 dan wawancara dengan Rum, Pemuda Desa Long Betaoh, di Long Betaoh, 5 Juni 2013.

## 2. “Gaduh Kebangsaan” Tanpa Kekerasan di Krayan Nunukan

Ada pernyataan Ketua Adat Besar Krayan, YB, di Long Bawan di pertengahan tahun 2013 yang menyatakan “*Jika dalam waktu 5 tahun tidak ada perbaikan jalan ke Krayan, Jangan salahkan kami jika patok batas berpindah ke Malaysia*”. Hal itu menggambarkan betapa kondisi nasionalisme di Krayan layaknya sebuah lukisan yang indah, jika dilihat dari maraknya perayaan 17 Agustusan, namun tak beraturan ketika dilihat lebih dekat terkait keterisolirannya dari Indonesia. Perlawanan warga perbatasan, bagaikan bara dalam sekam. Dalam hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan adanya kecenderungan kondisi yang saling bertentangan. Ketika sebagian penduduk perbatasan di Krayan mendukung bangun keindonesiaan, namun disaat yang sama, sebagiannya lagi memilih meninggalkan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia dengan memilih Malaysia menjadi tempat mereka bernaung.

Cukup banyaknya warga Krayan yang memilih Malaysia menjadi sebuah kenyataan pahit bagi politik identitas Indonesia. *Nasion* cenderung belum berhasil secara optimal mempertahankan ikatan kebangsaan bagi warga negaranya, dan tentunya ini bukanlah hal yang membanggakan dalam sejarah bangsa ini. Kenyataan pahit tidak hanya berhenti hingga di situ. Ancaman bernada separatis kerap dilontarkan oleh elit ataupun masyarakat biasa di Krayan. Sepertinya saat ini ancaman seperti inilah yang mereka anggap mampu menyentuh “pendengaran” dan “hati” para elit di tingkat pusat ataupun daerah. Mengingat NKRI adalah harga mati, yang tentunya tidak menolerir tindakan separatis apapun. Lalu seperti apa sesungguhnya rasa keindonesiaan itu hadir dalam benak dan keseharian masyarakat di Krayan?

Bagi sebagian orang Krayan, tanah yang mereka tinggali adalah berkah dari Tuhan yang merupakan tanah air mereka, Indonesia, yang tak kan tergantikan. Ada ungkapan Garuda di dadaku, walaupun harimau di perutku. Indonesia tetap kebangsaanku walaupun Malaysia tempat bergantungnya kehidupanku. Krayan yang berhawa sejuk dan subur, letaknya seperti “Kuali” di dataran tinggi, menampung humus

dari gunung. Lahan yang subur itu menyebabkan areal persawahan menjadi cukup produktif. Sawah-sawah Krayan menghasilkan limpahan beras, terutama Beras Adan, yang demikian sehat dan nikmat. Kenikmatannya menyebabkan beras ini menjadi salah satu makanan favorit Sultan Brunei.<sup>24</sup> Karena kesuburan dan keindahannya itu masyarakat mengatakan bahwa Krayan adalah 1 persen miniatur surga di bumi Tuhan di Kalimantan.

Meski subur, kehidupan masyarakat tidak beranjak naik secara signifikan. Kenyataannya produk-produk pertanian Krayan tetap sulit dipasarkan ke tanah air. Hal ini terutama karena sulitnya transportasi untuk membawa berbagai produk itu ke luar Krayan. Produk-produk Krayan, dalam kenyataannya, lebih banyak dipasarkan di Malaysia. Namun permainan harga oleh pihak Malaysia menyebabkan kemakmuran masyarakat tidak kunjung mewujud. Mengenai perilaku warga Malaysia ini simak penuturan warga Krayan berikut ini:

”Warga Malaysia melakukan diskriminasi pada kami warga Krayan bila berniaga ke Ba’ Kelalan. Harga kebutuhan pokok mereka jual sangat tinggi kepada kami, sementara mereka membeli produk kami begitu rendah. Kemudian upah kerja kami juga sangat murah dan dibedakan dengan warga asli Malaysia.”<sup>25</sup>

Pelbagai kondisi di atas menunjukkan adanya sebuah keterisoliran serius dan dalam perkembangannya telah menimbulkan banyak dampak terhadap cara pandang dan perilaku kewarganegaraan ganda beberapa warga di perbatasan. Dalam nuansa serba terbatas, ketidakadilan dan kemiskinan relatif menjadi potret buram perbatasan. Untuk melihat ekspresi kebangsaan dapat dilihat dari pengetahuan warga perbatasan soal simbol kebangsaan yang mereka ketahui dan gunakan sebagai orientasi politik identitas mereka. Bagian ekspresi dan persepsi kebangsaan ini dapat diketahui mulai dari tindakan, sikap, pandangan hingga sesuatu yang bersifat simbolis seperti bangunan, perayaan ataupun kegiatan upacara atau perayaan yang

<sup>24</sup> Informasi bersumber dari Tipa S. Padan, di Krayan, Nunukan.

<sup>25</sup> Informasi bersumber dari Damus Singa, di Nunukan.

menandakan hadirnya semangat kebangsaan. Walaupun bagi sebagian ilmuwan sosial hal itu tidak menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya, namun sebagai sebuah kenyataan, dianggap penting dalam memotret nasionalisme dan politik identitas suatu komunitas penduduk di perbatasan darat Indonesia Malaysia di Krayan.

Menurut anggota DPRD Nunukan, Damus Singa, eksistensi nasionalisme masyarakat Krayan dapat terlihat dari khidmatnya upacara bendera pada saat terutama perayaan Hari Kemerdekaan. Perayaan itu biasanya diikuti oleh berbagai kalangan dan dihadiri oleh penduduk dari berbagai usia di lapangan Berian Baru, Krayan. Kekhidmatan itu menurut Damus, yang Lahir di Long Bawan, Krayan, menyiratkan makna keindonesiaan yang cukup dihayati. Baginya momen 17 Agustus merupakan momen yang spesial.<sup>26</sup>

Tidak hanya berhenti pada pelaksanaan upacara yang khidmat tersebut. Wujud penghayatan keindonesiaan yang mendalam tersebut juga diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan perayaan kemerdekaan yang meriah. Damus Singa mengatakan selain kekhidmatan perayaan Hari Kemerdekaan RI di Krayan pada setiap tahunnya juga diwarnai dengan kemeriannya. Dia menggambarkan bahwa perayaan kemerdekaan itu layaknya sebuah pesta rakyat, yang diadakan selama sebulan penuh dan diisi oleh berbagai kegiatan seperti seni, olah raga dan perlombaan. Kegiatan itu dilakukan nyaris tanpa henti, siang dan malam hari. Demikian marak perayaan hari kemerdekaan itu hingga diyakini oleh beberapa kalangan bahwa Perayaan 17 Agustus di Kecamatan Krayan lebih ramai jika dibanding dengan perayaan Hari Natal, atau hari besar agama Kristen lainnya.<sup>27</sup>

Belum lama ini, ekspresi kebangsaan masyarakat Krayan itu juga ditunjukkan dengan membuat sebuah prestasi besar demi menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari bangsa ini. Pada tahun 2010, sebagai rangkaian dari perayaan Hari Kemerdekaan digelar acara pencapaian rekor MURI untuk gelar makan

kuliner tradisional *Luba laya* terbesar dan terbanyak khas Dayak Lundayeh Krayan.<sup>28</sup> Simak petikan ajakan dari ketua adat Dayak Lundayeh Krayan di bawah ini.

“..Ayo mahasiswa dan orang Krayan yang sudah lama ndak pulang-pulang ke Krayan- tengok Krayan bah... pas 17 Agustus neh..... dalam rangka HUT RI tahun 2010. Kita di Krayan ada ide atau misi untuk memecahkan rekor MURI terkait makanan tradisional. Selama ini rekor tersebut dipegang oleh Kab. Malinau. dengan jumlah jenis makanan 170 lebih jenis makanan tradisional dengan panjang susunannya lebih dari 1,5 km. Nah...kami undang pulang semua orang Krayan agar pencapaian misi itu berhasil kita laksanakan....”<sup>29</sup>

Joe Albert Christian warga Krayan yang lain menilai ide membuat rekor MURI Kuliner tradisional terbanyak dan terpanjang dalam rangka perayaan 17 Agustus di Krayan merupakan sebuah hal menarik dan tepat waktu karena dilaksanakan pada hari kemerdekaan RI di Krayan. Dengan membuat rekor MURI yang baru, mengalahkan rekor kabupaten tetangga Malinau, tentu akan memberikan kebanggaan bagi masyarakatnya. Dalam konteks ini, tampak ada upaya menumbuhkan politik identitas Krayan sebagai bagian Indonesia, dengan mengambil momentum perayaan Hari Kemerdekaan. Tentunya tidak meninggalkan identitas budaya asli mereka.

Indikator kebangsaan yang lain adalah mengenal simbol negara. Jika hal itu diujikan kepada penduduk Krayan yang telah bersekolah pengetahuan mereka tentang simbol-simbol keIndonesiaan tidaklah mengecewakan. Saat ditanyakan apa lagu kebangsaan Indonesia kepada beberapa pelajar SD 10 Krayan, jawabannya persis sama dengan jawaban pelajar SD di Long Nawang, Malinau, mereka lancar menjawabnya ”Indonesia Raya” dan bisa menyanyikannya

<sup>26</sup> *Ibid*, - Damus Singa.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Damus Singa, MA, Anggota DPRD Nunukan Dapil Krayan, di Nunukan, 25 Juni 2013.

<sup>28</sup> Dalam bahasa Dayak, *luba*’ berarti nasi, dan *laya*’ berarti empuk atau lembek. Nasinya terus-menerus diaduk selama proses memasak, sehingga hasilnya adalah setengah bubur setengah nasi. Bubur padat yang masih panas ini kemudian dibungkus dengan daun pisang, sehingga aroma daun membuat nasinya harum. Lihat “Budaya Dayak”, Bondan Winarno, *Kompas*, Rabu, 27 Agustus 2008.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Tipa S. Padan seorang tokoh masyarakat, di Krayan, 28 Juni 2013.

dengan lancar. Juga pertanyaan tentang apa Bendera Negara Indonesia, jawabannya Merah Putih. Siapa pahlawan nasional Indonesia, para pelajar umumnya mengenal dari guru di kelas dan bahan bacaan minimal yang ada di sekolah mereka. Patut diketahui bahwa di Krayan sudah ada SMAK dan sekolah Teologia pertama di Borneo atau pulau Kalimantan, yang letaknya di Berian Baru.

Sepintas lalu, masalah kebangsaan di Krayan tidak menunjukkan sebuah persoalan yang berarti. Namun, di balik gegap gempita Perayaan 17 Agustus setiap tahunnya, ada arus besar yang berulang datang melawan arus nasionalisme yang tampak baik di permukaan. Sehingga dapat dikatakan kemeriahan Perayaan Hari Kemerdekaan cenderung hanya bersifat simbolis bukan yang substansial.

Namun disisi lain, lewat wawancara dengan penduduk akan terasa gejala alienasi atau keterasingan terhadap Indonesia yang nampak dari pemahaman atau pengetahuan masyarakat pada figur-figur pemimpin RI. Ketika pelajar SD 10 Krayan, misalnya, ditanyakan siapa presiden mereka, mereka lama terdiam. Begitu juga saat ditanya siapakah Gubernur Kalimantan Timur. Akhirnya terungkap bahwa mereka tak kenal siapa pasangan Presiden SBY-Budiono atau Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek pun tak begitu dikenal. Unikny mereka justru lebih mengenal Awang Dampit, seorang tokoh keturunan Krayan yang berhasil di Miri (perbatasan Serawak dan Brunei Darusalam).

Dia lah tokoh fenomenal asal Krayan, yang pulang kampung membawa alat-alat berat (*bulldozer, eskavator*) untuk membuka jalan darat dari Long Midang menuju Ba' Kelalan. Nama Awang Dampit demikian harum karena apa yang dilakukannya itu memungkinkan warga Krayan untuk dapat lebih mudah membeli barang-barang kebutuhan pokok (sembako, minyak) dan memasarkan produk Krayan (beras Adan, garam gunung, kerbau, gaharu, hasil hutan) di Ba' Kelalan. Meski kondisi tersebut tidak dapat dianggap mewakili situasi yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, namun realitas di atas patut pula diperhatikan dan tidak dinafikan. Kenyataan bahwa masyarakat di sana lebih mengenal tokoh lokal dan asing sama sekali terhadap

tokoh nasional adalah sebuah ironis yang mencerminkan sebuah keterisoliran yang akut. Jika tokoh-tokoh seperti presiden saat ini saja demikian asing, bisa jadi figur-figur pemimpin nasional sebelumnya sama asingnya di benak masyarakat. Keironisan ini menjadi bertambah dengan kenyataan bahwa di sebagian masyarakat, figur-figur pimpinan negara Malaysia lebih mereka ketahui.

Hal yang juga menarik diketahui terkait kadar nasionalisme di perbatasan adalah bahwa di wilayah ini semangat yang bernuansakan pemisahan diri juga ada. Semangat ini bukanlah hal yang baru di wilayah Kalimantan pada umumnya dan wilayah Kalimantan Utara pada khususnya. Kondisi orientasi politik kewargaan wilayah Kalimantan Utara, terutama di pertengahan tahun 1960-an menjadi salah satu basis kelompok separatis di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dalam konteks kekinian, di beberapa wilayah Apo Kayan saat ini kerap terlontar lagi pernyataan-pernyataan yang bernuansakan disintegratif. Menurut narasumber Dr. Soni Sumarsono, pejabat di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, bisa jadi ada fenomena "tidak ada hari tanpa pernyataan merdeka di perbatasan"<sup>30</sup>.

Dalam konteks itulah tidak mengherankan jika hingga saat ini pernyataan-pernyataan bernuansakan separatis itu masih kerap terdengar. Hal itu terlontar misalnya dari seorang narasumber ini berinisial BTM yang menyatakan sebagai berikut:

*"Jika kalian (Presiden dan Pemerintah Pusat) tidak memperlakukan kami dengan layak seperti orang-orang transmigran yang kalian taruh di Tanah kami, Kami berhak mengusir orang-orang kalian untuk pulang ke pulau mereka masing masing! Kami tidak rasis, Tapi kami realistis. Kami sudah cukup bersabar!..."*<sup>31</sup>.

Dualisme kondisi di atas menunjukkan bahwa soliditas nasionalisme di Krayan tidaklah pada sebuah posisi yang kokoh. Meski sampai saat ini belum sampai pada titik yang benar-

<sup>30</sup> Pendapat ini dikemukakan pada saat seminar hasil penelitian DIPA, 2013 di P2P LIPI, Jakarta.

<sup>31</sup> Wawancara dengan nara sumber yang tidak ingin diungkap identitasnya di Krayan, 28 Juni, 2013.

benar mengkhawatirkan ataupun berbahaya, namun bukan tidak mungkin ketidakkokohan ini dikemudian hari semakin memburuk. Apalagi jika situasi dan kondisi keterpurukan yang ada –sebagaimana yang akan dibahas pada bagian selanjutnya– tidak kunjung mendapatkan jawaban yang komprehensif. Hal yang pasti, kondisi di Krayan menunjukkan sebuah dukungan pada anggapan bahwa eksistensi nasionalisme pada akhirnya perlu selalu didukung oleh upaya pemeliharaan yang intensif dan sungguh-sungguh, agar dapat berkembang dan menguat sebagaimana yang diharapkan.

Dualisme politik identitas dan posisi melemahnya rasa kebangsaan yang ada di Krayan tidak tumbuh dalam suasana vakum. Terdapat berbagai hal yang melatarbelakanginya. Penelitian ini meyakini bahwa banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Diantara banyak faktor itu terdapat dua faktor yang tidak dapat diabaikan dalam mengkaji dualisme masyarakat di Krayan yakni, (1) keberlanjutan keterasingan akibat, terutama disebabkan oleh belum maksimalnya kepedulian pemerintah, yang menyebabkan ada perasaan disingkirkan, (2) ketidakberdayaan untuk selalu tergantung pada jiran yang pada akhirnya menyebabkan kebanggaan sebagai bagian dari Republik Indonesia menjadi tereduksi.

Perhatikan bangunan irigasi di bawah ini. Keberadaannya merupakan ekspresi perlawanan tanpa kekerasan terhadap politik anggaran perbatasan yang timpang dialokasikan ke wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Hal ini menjadi keluhan utama dari wakil rakyat asal Krayan, Damus Singa, yang mewakili warganya di DPRD Nunukan.



Sumber: Dokumentasi Pribadi.

**Gambar 3.** Bangunan Dam di Desa Krayan

Dam ini mestinya dibuat di hulu untuk menampung air kemudian menjadi bagian irigasi di persawahan. Ada satu hal yang ironis dan paradoks, karena dana yang tersedia untuk Krayan kecil, maka yang mampu dibangun hanya dam, dan sengaja dibuat di hilir sebagai bentuk protes sosial. Krayan berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber lebih membutuhkan pembangunan jalan darat dalam jangka menengah dan menginginkan perbaikan sarana transportasi udara dalam jangka pendek. Namun, apa yang dapat dibuat dengan alokasi APBD yang kurang dari 1 miliar dan dibagi untuk 5 kecamatan perbatasan lainnya. Hasilnya dibangunlah dam irigasi Krayan di tempat yang salah. Bukan di hulu untuk menampung air, tapi di hilir, sebagai “proyek asal jadi”.

Selain soal alokasi pembangunan untuk daerah Krayan yang masih sangat timpang, nara sumber juga menambahkan posisi politik orang Lundayeh, Krayan yang masih marginal. Masyarakat Krayan menurutnya masih sulit masuk dalam dunia politik, birokrasi, pendidikan, tentara atau polisi di Kalimantan Timur, yang sekarang di mekarkan menjadi Kalimantan Utara. Ia juga menyinggung soal politik anggaran yang belum berpihak kepada pembangunan perbatasan wilayah darat dengan Malaysia. Dia mengatakan:

“..Krayan merupakan salah satu kecamatan yang tercatat sebagai kecamatan tertinggal dan saya menyatakan pemerintah daerah Kab.Nunukan tidak becus mengurus daerahnya.....bukan hanya Krayan saja, masih terdapat 3 kecamatan yang tertinggal infastruktur pembangunan itu, dikarenakan APBD bukan untuk rakyat melainkan membangun sebuah dinasti. Buktinya Lun Dayeh sendiri hampir tidak ada yang mendapat posisi di kabupaten Nunukan. Bahkan guru yang di tempatkan di Krayan “non lundayeh” itu sampai hari ini belum muncul batang hidungnya di Krayan! Apakah ini merupakan suatu kepedulian dari wakil rakyat dan pemimpin daerah di kabupaten Nunukan.....Jangan membangun dinasti kekuasaan saja!..”<sup>32</sup>.

Politik anggaran yang sama sekali tidak didasari oleh prinsip keadilan dan persamaan hak terjadi nyata terjadi di Krayan. Meskipun Pemerintahan Presiden SBY telah mencanangkan

<sup>32</sup> Wawancara dengan Damus Singa, MA, Anggota DPRD Nunukan Dapil Krayan, 25 Juni 2013.

sebuah program percepatan pembangunan, semisal, Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), namun tetap saja tidak mampu mengoreksi politik anggaran yang timpang untuk wilayah perbatasan. Masyarakat tetap melihat bahwa APBD yang ada justru diupayakan untuk memperkaya diri jajaran pemerintahan daerah (kabupaten Nunukan). Bahkan mereka menuding kabupaten induknya sedang membangun dinasti politik demi melanggengkan kekuasaan yang mereka pegang saat ini. Pemerintah Kabupaten Nunukan yang sudah diberikan amanah sebagai pengelola pembangunan daerahnya melalui konstitusi (UUD 1945 pasal 18), harusnya mampu mengelola pendapatan asli daerah yang mereka miliki untuk kebutuhan masyarakat di perbatasan.

Ada usulan agar TNI di perbatasan bukan hanya bertugas menjaga perbatasan, namun juga sebagai ‘prajurit pembangunan’ infrastruktur perbatasan. Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan RI perlu duduk satu meja memberikan regulasi kebijakan payung hukum bagi TNI AD bagian Zeni untuk mendapatkan penugasan khusus pada masa damai membangun ruas jalan darat yang mulus sepanjang perbatasan; penugasan khusus bagi TNI AU untuk membangun bandara perintis militer dan sipil; di beberapa titik strategis desa ujung perbatasan untuk akses jembatan udara yang cepat dan efisien; dan mendampingi Pemda di kabupaten perbatasan membuat perencanaan jangka panjang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau penyertaan modal penerbangan. Akibatnya, akses untuk masuknya barang dan orang dalam konteks pariwisata dan perdagangan akan memakmurkan wilayah perbatasan.

Selain itu, untuk merawat kebangsaan di halaman depan Indonesia ini, pihak eksekutif di Jakarta perlu mendukung dan meneruskan pembuatan program televisi dan radio yang memuat acara khusus bagaimana perhatian semua pihak di Indonesia untuk memajukan halaman depan negara. Acara semacam ‘suara dari tapal batas’, iklan layanan masyarakat, sinetron dan film, menjadi penting untuk merawat kebangsaan. Stasiun pemancar ulang yang menayangkan program-program nasional wajib ditambah di Long Nawang dan Krayan.

Selain itu, perlu adanya tugas khusus TNI sebagai tentara pembangunan infrastruktur, penugasan Zeni untuk pembangunan jalan darat, AU untuk bandar udara Militer-Sipil yang lebih besar di Long Nawang dan Krayan, dan penugasan Kementerian Ekonomi dan Industri Kreatif juga kementerian Desa, Pembangunan *Daerah Tertinggal* dan *Transmigrasi*, untuk mengubah paradigma perbatasan yang serba terbatas menjadi ‘halaman depan Indonesia’ yang maju dan melimpah dengan membangun infrastruktur perdagangan dan pariwisata yang terbengkalai. Hal tersebut sangat penting bagi warga Indonesia di perbatasan untuk merawat kebangsaan warga Long Nawang dan Krayan di Kalimantan Utara, agar bangga menjadi orang Indonesia dan juga Bank Indonesia untuk wajib menjaga agar mata uang rupiah menjadi alat tukar resmi yang berdaulat di halaman depan negara.

Kemampuan mengelola pembangunan daerah perbatasan ini juga sebaiknya diikuti kemampuan untuk melihat potensi-potensi apa yang belum dan sudah dimiliki wilayah perbatasan, sehingga optimalisasi terhadap pemanfaatan potensi kehutanan, keindahan alam, dan buah-buahan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan kehidupan masyarakat di sana. Selain salah urus pengelolaan pembangunan, ketergantungan yang cukup besar terhadap Malaysia, ini juga dapat dilihat sebagai akibat dari keterisoliran yang dijelaskan sebelumnya, ketergantungan yang cukup kuat terhadap Malaysia memberikan pengaruh terhadap kedekatan masyarakat perbatasan dengan keindonesiaan, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Ada kecenderungan bahwa hampir 90 persen kebutuhan pokok warga Krayan Indonesia, didatangkan dari Ba’ Kelalan, Malaysia. Sebut saja komoditas bensin dalam drum dan gas dalam tabung bermerk Petronas, gula pasir dalam kantung plastik berlogo *One Malaysia*, makanan cemilan seperti kue-kue, permen dan coklat bermerk Milo, Malaysia. Kendaraan operasional empat gardan yang beredar di jalan berlumpur dan motor roda dua tanpa plat nomor polisi, didatangkan dari Malaysia.

Seorang narasumber asal Krayan, Hengki Lalung Basar, secara emosional menyampaikan

keluh-kesahnya soal nasionalisme Indonesia dan aksi ganyang Malaysia, karena berbagai persoalan hubungan kedua negara. Namun pesan tersiratnya, jika memang orang dan tokoh di Indonesia mempunyai nasionalisme yang tinggi, tentu merekalah yang perlu membangun secara nyata wilayah perbatasan. Mereka yang tidak mau membangun Krayan lah yang tidak nasionalis, jangan salahkan mereka jika bergantung dengan negara sebelah. Berikut penuturan nara sumber :

“...Dimana-mana ada teriakan orang-orang di Jawa dan tempat lain-lain berupa aksi ganyang Malaysia.....sikat habisi....apakah kita sebagai anak bangsa tidak melihat daerah-daerah perbatasan, seperti kami di Krayan, yang hidupnya hampir 80% masih numpang dengan negara sebelah, yang saat ini isu yang kurang enak didengar dan dibaca, di media TV dan Majalah ‘Koran’ Nasional, maupun Lokal, mereka yang katanya sebangsa dengan kami, bisanya cuma asal bicara saja. Ada yang mengatakan salut bagi daerah perbatasan yang selalu sabar menanti... kapan? Siapa yang akan mengubah nasib orang-orang yang tinggal di perbatasan?. Siapa yang lebih tidak nasionalis, kami atau mereka?...”<sup>33</sup>

Walaupun kampung Long Bawan berada di wilayah Indonesia namun jangan tanya produk buatan negeri sendiri di kios-kios tersebut. Semua yang dijual adalah buatan Malaysia, mulai dari gula, kopi, snack, permen, roti biskuit, sabun, batu baterai, jala, alat pancing hingga bahan bakar. Lebih mudah memperoleh barang-barang tersebut dari Malaysia daripada Indonesia.

Dapat terlihat di sini, kebutuhan paling mendasar masyarakat justru hanya mampu dipenuhi dengan membeli mahal dari kota terdekat di negeri jiran. Keakraban di lidah dan di perut terhadap produk makanan Malaysia pada akhirnya bisa saja menciptakan persepsi bahwa yang menopang kebutuhan hidup paling mendasar adalah Malaysia. Indonesia sama sekali tidak pernah hadir atau belum, “di dalam lidah maupun perutnya” orang Krayan. Lalu, bagaimana Indonesia akan mampu hadir di dalam benak mereka, pertanyaan kritisnya.

Keakraban dalam mengonsumsi produk-produk Malaysia di perbatasan saat ini ditemukan oleh peneliti tidak lagi dalam kondisi tidak ada

pilihan mengingat keterbatasan yang ada. Namun, di kalangan anak-anak usia sekolah, keakraban ini justru telah menjadi suatu prestise kondisi ekonomi. Sesuatu yang membanggakan bagi mereka jika pada peralatan sekolah yang mereka gunakan terdapat logo yang bernuansakan Malaysia, baik itu bendera Malaysia ataupun logo menara kembar petronas.

Salah satu indikator seseorang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dalam penjelasan sebelumnya adalah adanya rasa bangga dan bahagia ketika menjadi bagian sebuah bangsa. Lalu bagaimana ceritanya jika rasa kebangsaan (keindonesiaan) itu diekspresikan oleh anak-anak usia sekolah di perbatasan yang justru bangga dengan kemalaysiaannya? Tentunya hal ini menjadi sebuah fakta yang cukup mengkhawatirkan bagi pemeliharaan rasa kebangsaan bagi generasi penerus bangsa. Peringatan dini atas rasa keindonesiaan yang semu rasanya layak untuk menjadi catatan penting bagi siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia ke depan.

### **Upaya Menghadirkan Keindonesiaan: Penawar yang Masih Hambar?**

Untuk kasus Long Nawang, ada upaya pemerintahan di era reformasi, tepatnya pada masa Pemerintahan SBY telah berupaya untuk menghadirkan peran negara yang memiliki perhatian lebih pada wilayah perbatasan dengan membentuk Kementerian Daerah Tertinggal. Posisi negara saat itu mulai kian positif untuk membangun kadar nasionalisme di perbatasan bahwa perbatasan bukan lagi halaman belakang, namun sebagai “beranda negara”. Sebuah perhatian yang kemudian diterjemahkan dengan menggabungkan tiga pendekatan sekaligus, yakni pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan.<sup>34</sup> Pendekatan ini telah melahirkan beberapa pandangan, misi dan program yang cukup atraktif meski dalam kenyataannya, layaknya sebuah permulaan, amat membutuhkan sebuah akselerasi yang kuat.

Sebagai bentuk komitmen dan perhatian pusat, misalnya, para pejabat saat ini sudah tidak segan untuk masuk ke wilayah perbatasan. Para

<sup>33</sup> Wawancara dengan Hengky Lalung Basar, Krayan, Juni 2013.

<sup>34</sup> Narasumber Soni Soemarsono dalam *Focus Group Discussion*, di P2P LIPI, di Jakarta, 1 Oktober 2013.

pejabat mulai dari Presiden hingga pejabat teras berbagai eselon ataupun anggota DPR telah menyempatkan hadir ke perbatasan. Meski tentu saja belum meliputi seluruh wilayah perbatasan, namun masyarakat nampak telah mulai terbiasa dan merasa hambar dengan kehadiran pejabat publik level nasional itu. Demikian cukup banyak dan seringnya frekuensi kehadirannya, hingga ada ungkapan di masyarakat perbatasan yakni bahwa “*hanya tinggal malaikat saja yang belum datang*”.<sup>35</sup>

Adanya paradigma baru pemerintah pusat yang mulai memandang penting wilayah perbatasan telah cukup mendorong pemerintah daerah dan jajarannya di kecamatan untuk lebih intens lagi berhubungan atau membuka komunikasi dengan masyarakat perbatasan. Dengan dorongan ini telah muncul sebuah kepedulian yang lebih baik untuk membangun perbatasan. Tema-tema “membangun desa”, misalnya, menjadi sesuatu yang menggejala, termasuk di Pemerintahan Malinau.

Bupati Malinau Yansen TP, misalnya, memiliki program kerja untuk membangun desa yang disebutnya sebagai “Gerakan Desa Membangun” (Gerdema), termasuk di wilayah perbatasan. Gerdema saat ini telah cukup terasa di banyak pedesaan di Kabupaten Malinau.<sup>36</sup> Tidak mengherankan jika kemudian di Desa Long Nawang, pada beberapa kesempatan pesan-pesan pemerintah tentang membangun dari desa itu terlihat demikian semarak. Termasuk, misalnya, saat dilakukannya pagelaran pertemuan masyarakat Dayak Kenyah, dimana spanduk dan umbul-umbul bertuliskan Gerdema demikian masif terlihat, terutama di tempat akan dilangsungkannya acara tersebut.

Untuk kasus Krayan, bagaimana menjelaskan upaya negara kita untuk menghadirkan perannya di perbatasan. Sebagai ilustrasi, untuk mendatangkan sembako ke Krayan sungguh penuh perjuangan. Warga Krayan harus berjalan

kaki memanggul barang di kepala atau naik ojek yang melewati jalan tikus yang ketika musim hujan berubah menjadi anak sungai yang begitu berat untuk dilewati. Jerry Semion, seorang warga Krayan bercerita betapa banyak warga Krayan di perantauan yang cinta akan daerah kelahirannya, namun terkendala dengan sarana transportasi yang kondisinya sangat buruk dan terbatas, sebagai berikut:

“...Kalau mau menjawab soal keindonesiaan orang Krayan dan krisis kebangsaan yang terjadi. Jawabannya sederhana lihatlah kondisi jalan dan biaya transportasi ke sini. Jalan darat ke Malinau jangan ditanya, satu-satunya jalan ya di atas awan, tapi ketersediaannya terbatas. Mau pulang ke Krayan saat libur Natal atau 17 Agustus tidak mudah pesawat penuh alias full...harus... tunggu lagi tahun depan..... rindu dengan daerah Krayan yg dingin... nggak perlu pakai kipas angin... nggak perlu pakai AC.... udah beku.... walau memakai selimut yang tebal seinci... ditutupi pakai tikar lagi, untuk mencari panas. Kalau pun mau pulang juga, harus memutar dari Tarakan, naik speed atau pesawat ke Tawau, lalu naik bus Miri, dari Miri lanjut ke Bakelalan Serawak, baru lah naik ojek atau four wheel, ke Krayan. Coba bayangkan untuk pulang ke Krayan, dari Kaltim atau Kaltara, harus memutar lewat Malaysia....”<sup>37</sup>

Berkaitan dengan sulitnya transportasi ke Krayan, Ir. Faridil Murad Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan menjelaskan dalam jangka panjang akan diperkeras jalan tembus dari Malinau menuju Krayan. Sementara inovasi yang akan dilakukan untuk memperbaiki mahalnya harga barang di Krayan adalah dengan memberikan alokasi anggaran subsidi untuk pesawat angkut udara, yang selama ini hanya subsidi penumpang. Selain itu, patut dicoba untuk mendatangkan kuda ke Krayan, selain untuk mengangkut orang dan barang, kuda makannya rumput dan daun yang melimpah di Krayan. Sehingga tidak perlu memakai bensin atau solar yang mahal karena dibeli dari Petronas dengan ringgit.<sup>38</sup>

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan, Ir. Faridil Murad menegaskan

<sup>35</sup> Pernyataan yang lebih sarkastik adalah “*hanya tinggal setan saja yang belum datang*”. Pernyataan-pernyataan semacam ini kerap terlontar dalam setiap wawancara dan diskusi terutama dengan kalangan tokoh masyarakat, aparat pemerintah di level bawah atau cendekiawan.

<sup>36</sup> <http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Malinau/43915>, diakses pada tanggal 17 Juni 2013.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Damus Singa, di Nunukan, Juni 2013.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Faridil Murad, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, di Nunukan, Juni 2013.

bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, terkait dengan perubahan paradigma perbatasan yang tadinya berupa wilayah sempadan, sekarang dan ke depan akan menjadi halaman depan Indonesia. Seharusnya, kata dia, APBD Nunukan tidak perlu lagi dibebankan anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan. Sebab masih banyak program lainnya yang perlu dibiayai daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya terutama mereka yang berada di kawasan pedalaman. Ia menyayangkan karena pemerintah pusat di Jakarta tidak atau belum mempunyai *masterplan* untuk pengembangan kawasan perbatasan. Padahal *masterplan* menjadi dasar untuk pembangunan di daerah ini. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan, Faridil Murad memberikan keterangan sebagai berikut:

“...*Masterplan* pengelolaan daerah perbatasan untuk Nunukan, termasuk Krayan dan 4 kecamatan perbatasan darat lainnya, belum ada. *Masterplan* potensi daerah yang harus digali apa-apa, juga tidak ada... Bagaimana rakyatnya mau sejahtera kalau infrastrukturnya minim? Padahal penduduk perbatasan itu ibarat pagar bangsa di sana. Ini juga tidak mendapatkan perhatian. Uang Pemda itu untuk membantu rakyatnya yang ada di pedalaman. Kalau bapak ke pedalaman melihat infrastruktur di sana sangat menyedihkan dan terisolir, untung saja masyarakat pedalaman Long Nawang tidak terlalu banyak tuntutan, karena sudah terbiasa begitu. Masyarakat Krayan, lewat ketua adatnya sudah membuat pernyataan, tetapi ini jangan dijadikan pembiaran. ....”<sup>39</sup>

Atas usul itu, Bupati Nunukan Basri, telah menyetujui untuk pembuatan *masterplan* pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan dan *masterplan* penggalan potensi daerah perbatasan, untuk mengetahui potensi yang perlu digali untuk percepatan pembangunan daerah perbatasan. Faridil juga mengatakan, jika penanganan kawasan perbatasan menggunakan APBD berarti Pemkab Nunukan dibebankan tanggungjawab untuk hal itu. Padahal, kawasan perbatasan merupakan masalah nasional yang mestinya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Menurutnya, tidak maksimalnya pembangunan di kawasan perbatasan selama ini disebabkan karena pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim tidak merespons usulan program pembangunan perbatasan yang diajukan Pemkab dan DPRD Nunukan. Hal ini juga dijelaskan oleh Damus Singa, yang setiap ada pertemuan dengan anggota DPR RI pusat dan acara yang dibuat oleh Harian Kompas soal Tapal Batas, mengungkapkan perhatian pihak pusat soal anggaran yang tepat sasaran untuk membangun daerah perbatasan dapat dikatakan ‘masih jauh panggang dari api’.<sup>40</sup>

Terisolirnya Krayan dari Kabupaten induknya, Nunukan, juga menjadikan mereka semakin tidak mengenal baik Indonesia. Akses transportasi baik darat ataupun udara tidak memungkinkan mereka untuk lebih sering melakukan kontak dan bersosialisasi dengan dunia luar. Menurut Lewi Gala, hanya kendaraan ojek motor yang masih berani lewat. Namun dengan harga yang “gila-gilaan” mencapai Rp 500.000, belum termasuk barang bawaan. Waktu tempuh ojek motor bisa 5 jam hingga 2 hari tergantung kondisi alam, hujan atau kering.

Hal yang membuat mahal biaya kendaraan darat adalah sarana fisik jalan yang sangat buruk karena hanya terbuat dari tanah dan batu tanpa pengerasan aspal atau semen. Selain itu, harga bahan bakar seperti bensin sangat melambung tinggi, dibanding harga resmi subsidi di Indonesia, Rp. 6.500, karena didatangkan dari Malaysia. Harganya di Krayan bisa mencapai Rp. 25.000/liter. Betapa biaya hidup yang mahal, membuat mereka sukar untuk bangga menjadi orang Indonesia di perbatasan.

Lewi Gala lebih lanjut menjelaskan adanya upaya membantu warga perbatasan dalam bentuk *affirmative action*, ada alokasi subsidi naik pesawat perintis dari APBD Nunukan, biaya dengan pesawat Susi Air dari Long Bawan ke Long Layu berkisar Rp. 250.000 dengan waktu tempuh hanya 10 menit. Namun, jika tidak dapat tiket subsidi, dengan pesawat MAF sekitar Rp. 500.000. Itupun harus singgah dulu di Long Bawan, bermalam dan keesokan harinya lanjut ke Long Layu menggunakan

<sup>40</sup> Wawancara dengan Damus Singa, di Nunukan, Juni 2013.

penerbangan *Kura-Kura Aviation*. Kebetulan saja kalau ada penerbangan, kalau tidak harus menyewa ojek motor yang melelahkan ke Long Layu. Lewi Gala mengungkapkan perasaan nasionalismenya terhadap Indonesia yang “layu” akibat terisolirnya mereka untuk bergerak dan memasarkan hasil pertaniannya, sebagai berikut:

“...Keadaan sulitnya transportasi inilah yang membuat warga Long Layu di Krayan Hulu, terbelakang dan terkucil. Warga Long Layu memendam ‘benci tapi rindu’ kepada pemerintah Indonesia. Kami merasa seperti belum merdeka, kami masyarakat Long Layu merasa terjepit, karena ditekan Malaysia dan tidak diperhatikan pemerintah Indonesia....Kami warga Long Bawan dan Krayan hanya bisa membawa dan menjual hasil bumi ke perbatasan di kawasan Ba’Kelalan, bukan ke Malinau atau Kecamatan Nunukan yang lain. Kurang apa kesetiaan warga Krayan kepada Indonesia. Dulu ketika konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pecah tahun 1963, masyarakat Krayan membantu kebutuhan logistik tentara Indonesia, selama 3 tahun lamanya. Sekarang kami merasa dilupakan. Namun demikian, mau apa lagi...sebenci-bencinya kami pada pemerintah Indonesia, kami tetap cinta Indonesia, tidak terbersit sedikit pun untuk ikut Malaysia. Kami tidak minta banyak kepada pemerintah Indonesia, kami hanya minta pemerintah membuka akses jalan dari Long Layu ke perbatasan dengan kota Miri di Sarawak, Malaysia yang jaraknya hanya 30 km. Sehingga ada pasar untuk semua hasil bumi masyarakat di Krayan....”<sup>41</sup>

Walaupun demikian, suasana kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dapat terlihat dan dirasakan. Keluhan mereka soal energi menjadi indikatornya. Tidak ada jaringan listrik sama sekali di Krayan Hulu. Untuk penerangan, warga mengandalkan generator dan beberapa rumah membeli perangkat solar sel dari Malaysia dengan harga yang sangat mahal. Ketersediaan listrik darurat dengan genset ini hanya mampu untuk dinikmati untuk beberapa jam saja di malam hari. Listrik mulai dinyalakan pada pukul 18.00 hingga pukul 22.00 karena harga bahan bakar yang mahal.

Sulitnya sarana komunikasi melengkapi kondisi keterpencilan dataran tinggi Krayan.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Lewi Gala, petani asal Krayan Hulu, di Krayan, 29 Juni 2013.

Satu-satunya alat komunikasi yang bisa digunakan adalah radio di kantor lapangan terbang perintis di tiap kampung dan wartel satelit dengan tarif tinggi mencekik leher yang per menitnya mencapai Rp.6.000. Wilayah Krayan Hulu berlimpah dengan beras dan sayuran, namun kebutuhan pokok lainnya sangat sulit didapat. Hanya ada beberapa kios yang menjual kebutuhan sehari-hari, namun isinya sangat sedikit dan tidak lengkap. Sikap tidak peduli pemerintah juga menyebabkan kondisi pembangunan perbatasan dinilai masih setengah hati dan asal ada saja.

Keluhan Lewi Gala yang lain adalah anggota dewan yang mereka pilih pada pemilu yang lalu (2009) cenderung malas untuk datang ke pedalaman Krayan Hulu. Lewi Gala mengisahkan, ia pernah bertemu dengan salah seorang anggota dewan dari DPRD Nunukan di Long Bawan yang didampingi wartawan Radar Tarakan dari Malinau, saat tengah melakukan kunjungan kerja (reses) di wilayah Kecamatan Krayan. Kepada Lewi Gala dia memastikan akan datang berkunjung, namun sampai hari ini tidak ada batang hidungnya. Menurut Lewi “Apa yang akan dia laporkan kalau dia tidak lihat dan datang sendiri ke Long Layu”? Padahal ada yang Lewi Gala ingin laporkan soal proyek yang dibangun di tempatnya yang terbengkalai. Wakil rakyat ada yang belum merakyat.

“...Coba lihat proyek pembangunan parit yang terbengkalai ini, begitu saja ditinggalkan pemborongnya. Sepanjang tepian kampung bertumpuk bebatuan yang berserakan. Seluruhnya hampir ditutupi rerumputan. Adukan pasir juga berserakan dimana-mana. Sungguh pemandangan yang tidak sedap di kampung kami. Long Layu dan kampung lain di Krayan Hulu sudah lama jadi obyek permainan para pemborong yang menang tender proyek untuk mengeruk keuntungan besar, tanpa ada tanggungjawab. Semua proyek pemerintah yang diorder kepada pemborong sama sekali tanpa pengawasan pemerintah setempat. Bahkan pejabat yang melakukan kunjungan kerja ke Krayan enggan masuk ke kampung-kampung di pedalaman. Mereka hanya sampai di Long Bawan kemudian segera kembali ke Nunukan....”<sup>42</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.*

Selain itu terdapat fakta menyedihkan ketika berbicara tentang sarana transportasi di Krayan. Tiga bangkai pesawat yang mengalami kecelakaan di lapangan terbang perintis Long Kayu, Krayan Hulu telah menjadi hiasan dan saksi bisu tidak pedulinya pemerintah terhadap dunia transportasi Krayan selama ini. Hingga tulisan dari laporan penelitian ini dibuat, belum ada usaha dari pihak terkait untuk sekedar memperbaiki pesawat-pesawat tersebut.

### Catatan Penutup: Peringatan Dini dan Solusi Kebangsaan

**Catatan pertama**, untuk masyarakat perbatasan di desa Long Nawang, Malinau, dalam kesehariannya, sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan harian. Keterasingan akibat lokasi yang sulit dijangkau memunculkan pelbagai keterbatasan. Akses yang terbatas bagi mobilitas barang-barang atau produk dari tanah air, baik dari Pulau Jawa, wilayah Kalimantan yang lainnya, ataupun Ibu Kota Provinsi menyebabkan keterbatasan pilihan barang-barang pemenuhan kebutuhan hidup.

“Jembatan udara” melalui pesawat-pesawat yang demikian kecil dalam prakteknya tidak banyak membantu. Dengan kapasitas angkut pesawat yang demikian minim ditambah dengan harga tiket yang mahal, tentu saja jumlah dan ragam barang menjadi terbatas dan berharga mahal. Secara umum, upaya pemenuhan kebutuhan itu, pada akhirnya, memunculkan semacam “fenomena ketergantungan” atas barang-barang dari negeri jiran. Terkait dengan kondisi perdagangan itu, masyarakat di Desa Long Nawang pun akrab dengan mata uang Ringgit Malaysia. Konon keakraban itu telah tumbuh sejak Malaysia itu berdiri, bahkan jauh sebelumnya.<sup>43</sup>

Hal ini tidak mengherankan mengingat keterisoliran dari sentra-sentra perdagangan di tanah air telah memaksa penduduk untuk terus menerus membuka kontak dagang dengan sentra-sentra perdagangan yang ada di wilayah Malaysia yang memang lebih terjangkau jaraknya. Dalam proses jual beli itulah penduduk perbatasan tidak punya pilihan lain selain menggunakan Ringgit.

<sup>43</sup> Informasi dari Dave Lumenta dalam FGD, di Pusat Penelitian Politik-LIPI, di Jakarta, 1 Oktober 2013.

Situasi semacam ini relatif tidak banyak berubah hingga saat ini. Hal ini terlihat, misalnya, dengan masih dapat digunakannya Ringgit dalam setiap transaksi perdagangan di Desa Long Nawang. Bahkan di daerah-daerah tertentu Ringgit cenderung lebih disukai, karena nilai tukarnya yang lebih tinggi ketimbang Rupiah.<sup>44</sup>

Meski demikian, seiring dengan perbaikan infrastruktur terutama jalan raya yang terus dikembangkan oleh pemerintah, saat ini sudah mulai masuk barang-barang produksi dalam negeri ke desa ini. Dari sisi proporsi, jumlah barang dari tanah air memang belumlah banyak, dan tetap beberapa kebutuhan pokok seperti gula dan telur didatangkan dari Malaysia. Namun secara umum, proporsi produk dalam negeri, setidaknya terlihat dari toko-toko kelontong di sekitar masyarakat, jumlahnya terus merambat naik. Menurut Ingkong Ala, salah seorang usahawan di Desa Long Nawang, jika dulu hampir 100% barang-barang yang dikonsumsi di desanya berasal dari Malaysia, maka saat ini jumlahnya sudah hampir sekitar 75-80% saja.<sup>45</sup>

Menurutnya, adanya akses darat —yang meskipun masih sangat menyedihkan kondisinya— yang menghubungkan wilayah Desa Long Nawang dengan Long Bagun di daerah Kutai Barat, telah memungkinkan lebih banyak lagi barang-barang dari Indonesia yang dapat masuk ke desanya.<sup>46</sup> Namun demikian, secara umum, kondisi perekonomian di Desa Long Nawang belum seutuhnya terlepas dari ketergantungan terhadap Malaysia. Keterisoliran ekonomi inilah nantinya menjadi salah satu persoalan pelik yang belum terpecahkan, yang belakangan sulit untuk tidak mengatakan tidak berpengaruh pada persoalan kemunculan dualisme yang tercermin dari pernyataan yang umum disuarakan masyarakat perbatasan yakni, “*Garuda di dadaku, Malaysia di perutku*”.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kueng Jalung, Kepala Desa Long Nawang, di Long Nawang, 4 Juni 2013.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ingkong Ala, pedagang dan tokoh masyarakat Desa Long Nawang, di Long Nawang, 6 Juni 2013.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Pernyataan tersebut berulang kali didengar oleh Tim Peneliti di hampir di setiap wawancara atau diskusi dengan masyarakat perbatasan yang terkait dengan persoalan ekonomi atau situasi interaksi mereka dengan pihak Malaysia.

Selain dalam konteks ekonomi atau perdagangan, ketergantungan juga terlihat dari mobilitas masyarakat di antara dua negara. Jika mayoritas WNI yang pergi ke Malaysia adalah mereka yang membutuhkan pekerjaan, atau dengan kata lain menyambung hidup, maka warga Malaysia yang berkunjung ke Indonesia sebagian besar adalah berkategori turis, yang datang sekadar beranjangsana dengan saudara-saudara mereka atau melakukan napak tilas eksistensi nenek moyang mereka di masa lampau. Dengan kata lain, setidaknya hingga kini, jika masyarakat Indonesia di perbatasan cenderung melihat jiran sebagai sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer, maka warga Malaysia melihat Indonesia sebagai wilayah pemenuhan kebutuhan sekunder atau bahkan tertier saja. Dalam posisi ini tentu saja akan dapat dengan jelas terlihat makna ketergantungan itu.

Posisi asimetris atau ketergantungan sedemikian tentu saja menimbulkan banyak efek. Bagi sebagian kalangan, termasuk para pengamat sosial, ketergantungan pada jiran itu menimbulkan masalah kebangsaan. Prof. Adri Patton, misalnya, mengatakan bahwa dalam batas-batas tertentu, kondisi tersebut telah cukup lama berkontribusi atas terjadi proses pemudaran rasa kebangsaan.<sup>48</sup> Masyarakat melihat pemerintah Indonesia tidak cukup memberikan perhatian terhadap kondisi wilayah dan kehidupan perbatasan, sementara Malaysia nampak memberikan prioritas untuk pembangunan di wilayah perbatasan. Akibatnya, kejomplangan kesejahteraan dan kondisi infrastruktur demikian kentara.

Keterdesakan hidup ini menyebabkan meredupnya rasa kebanggaan apa lagi rasa nasib sepenanggungan dengan anak bangsa lainnya. Sebaliknya, timbul semacam perasaan membanggakan jiran. Menurut Adri, "mereka (masyarakat perbatasan, pen) bangga dengan semua yang berbau Malaysia. Sedang yang berbau Indonesia dijelek-jelekan oleh bangsa sendiri".<sup>49</sup> Bahkan bukan hal aneh jika warga di perbatasan ada yang tidak tahu siapa Presiden RI, lagu kebangsaan Indonesia Raya sampai mata uang. Adri juga mengatakan, "Kalau

ditanya soal uang, yang mereka tahu itu Ringgit Malaysia. Kenapa, karena memang di kampung mereka mata uang itu laku dibelanjakan".<sup>50</sup> Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bank Indonesia untuk mengawal kedaulatan rupiah sebagai alat tukar resmi Negara di halaman depan Indonesia.

**Catatan kedua,** Nasionalisme Indonesia di perbatasan Krayan, Nunukan, sedang dalam pertarungan. Perlu peringatan dini untuk disampaikan bahwa telah terjadi kecenderungan krisis politik identitas di sebagian besar masyarakat dan elit lokal Krayan. Indikasinya, sebagian warga Krayan telah melakukan diaspora ke Serawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Mereka yang keturunan Lun Dayeh atau Lub Bawan atau Orang Ulu Sungai ini telah memiliki *Identity Card* (IC) Malaysia dan sebagian telah menjadi pemilih dalam Pilihan Raya (Pemilu). Dengan situasi yang telah digambarkan di atas adalah logis kalau dikatakan bahwa jika Krayan tidak dikelola dengan baik oleh pihak pusat dan pemerintah daerah maka risiko politik yakni, Krayan akan menjadi bagian Serawak Malaysia sangat tinggi. Apalagi kenyataan menunjukkan ada gejala dimana hampir separuh populasi Dayak Lun Dayeh, Krayan sudah bermigrasi ke wilayah Malaysia Timur, karena terbuka akses jalan darat ke sana, ketimbang ke wilayah Indonesia.

Problem transportasi, untuk itu mau tidak mau harus dituntaskan. Kondisi dimana masyarakat terus terisolir karena persoalan minimnya transportasi ini harus segera di atasi. Upaya-upaya itu harus mendapat jawaban. Jangan sampai terus terulang, misalnya, kegagalan upaya masyarakat Krayan melalui anggota DPRD Nunukan untuk dapat mendaratkan kapal berbadan sedang atau besar di bandara Krayan, Yupep Semarang. Saat ini, walaupun secara fisik bandara tersebut telah diperkeras dan telah diperpanjang landasannya dari 600 meter, menjadi 1600 meter, sehingga layak untuk didarati pesawat Foker, Cassa dan sejenisnya. Sampai dengan saat ini, dapat disimpulkan bahwa kendalanya terkait dengan birokrasi perizinan yang tidak jelas dan berbagai pihak tidak mendukung dan menutup mata saja terhadap persolan transportasi di Perbatasan.

Ada gagasan dari warga agar Pemda di provinsi perbatasan membuat Perda

<sup>48</sup> Wawancara dengan narasumber Adri Patton, Mei 2013.

<sup>49</sup> <http://www.bongkar.co.id/news/politik/664-kok-perbatasan-diurutan-10.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2013.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Penyertaan modal atau lebih baik lagi kalau membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penerbangan, daripada terus menerus menyewa atau memberikan subsidi penerbangan yang hasilnya kuantitas dan kualitas penerbangan dari Krayan ke wilayah Indonesia yang lain sangat terbatas dan jelek. Terkait dengan hal itu, perlu terobosan dan keberanian Pemda Nunukan dan dukungan pemerintah pusat agar Krayan dijadikan tujuan wisata unggulan, sehingga armada udara semacam Air Asia, Citilink, Lion Air, secara alamiah dan hukum pasar membuka rute penerbangan ke Krayan. Hal itu bukanlah tanpa peluang, mengingat potensi alam dan komoditas lokal Krayan, sangat potensial untuk pengembangan pariwisata dan penerbangan, kuncinya di transportasi udara dalam jangka pendek dan transportasi darat dalam jangka menengah dan panjang.

Hingga kini terasa sekali adanya perbedaan yang besar antara armada penerbangan di Krayan (RI) dan Ba'kelalan (Malaysia). Di Krayan kebutuhan transportasi udara dilayani oleh penerbangan swasta dan *volunteer*, pesawat berbadan kecil, sementara jirannya dilayani penerbangan publik Malaysia yang daya angkutnya lebih besar. Dalam hal ini, negara kita kalah dalam memberi pelayanan transportasi kepada bangsa sendiri. Selain persoalan jalur udara, pembenahan dalam pelayanan jalur daratpun jelas tidak dapat dibiarkan. Keduanya berkelindan dan akan saling menguatkan. Meskipun disadari oleh banyak kalangan bahwa pembangunan infrastruktur darat di jantung Kalimantan ini penuh tantangan, namun keberadaannya diyakini akan banyak memberikan manfaat dalam berbagai sendi kehidupan. Hal yang pada akhirnya akan mengakhiri keterisoliran masyarakat dan pada gilirannya dapat mengokohkan rasa keindonesiaan yang kian tergerus. Secara praktis dapat dikatakan, jika jalan darat terbuka, maka ketergantungan perdagangan dengan Malaysia perlahan akan beralih juga ke Indonesia. Masalah Krayan sebagai wilayah hutan lindung Kayan Mentarang, sudah tegas dijawab oleh ketua Adat Krayan, Yagun Bangau, bukan termasuk wilayah tanah adat Krayan. Sehingga tidak ada alasan hambatan birokrasi perizinan dalam membangun jalan tembus Krayan Malinau.

Selain persoalan transportasi, yang terkait erat dengan situasi keterisoliran, masalah ketergantungan pada jiran dan pemiskinan yang berkelanjutan juga hal pokok lain yang harus segera dijawab. Dengan kata lain, peningkatan dan pemerataan kesejahteraan harus menjadi prioritas. Hal ini telah menjadi rumusan umum. Soni Sumarsono bahkan menyimpulkan bahwa pada akhirnya persoalan kebangsaan akan selalu terkait dengan persoalan kesejahteraan.<sup>51</sup> Kegagalan menciptakan kesejahteraan adalah pintu masuk bagi luruhnya rasa kebangsaan. Dengan kata lain, jika kesejahteraan tak kunjung hadir, maka nasionalisme di perbatasan darat akan jadi pertarungan politik di halaman depan Indonesia.

Sebagai catatan tambahan, saat ini keberadaan Indonesia di perbatasan yang antara lain menjadi kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di perbatasan perlu dikembangkan bukan hanya penjaga tapi juga pembangun. Kehadiran TNI sebagai penjaga perbatasan di tanah air Indonesia patut disyukuri dan dibanggakan. Kehadiran mereka menandakan Krayan adalah tanah bertuan dan dijaga dengan baik. Ada usulan agar program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) perlu dihidupkan menjadi TNI Membangun Perbatasan (TMP), pasukan Korps Zipur perlu diberdayakan untuk membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan Malinau ke Krayan.

Bukan tanpa alasan dan juga bukan merupakan pemikiran atau saran yang terburu-buru jika peneliti disini melihat bahwa TNI memiliki peran sangat penting dalam menjaga dan membangun nasionalisme di perbatasan dengan fungsi selain kombatan (perang). Membangun perbatasan dengan medan geografis (alam) yang amat berat tentunya tidaklah mudah. Perlu pengalaman dan daya dukung peralatan untuk menembus hutan-hutan lebat di jantung Kalimantan tersebut. TNI dengan pengalaman pelatihannya yang sangat dekat dengan alam seperti di perbatasan dan didukung oleh peralatan yang memang dirancang untuk efektif di medan yang sulit, tentunya diharapkan mampu mendukung upaya pembangunan tersebut. Hal ini terutama dalam hal membuka keterisoliran perbatasan dengan pembangunan jalan darat.

<sup>51</sup> Narasumber Soni Soemarsono dalam *Focus Group Discussion*, di P2P LIPI, di Jakarta, 1 Oktober 2013.

Meskipun saran ini terkesan hendak memasukkan kembali TNI dalam persoalan-persoalan pembangunan yang harusnya dikerjakan sipil, namun tidak ada salahnya pengalaman yang dimiliki TNI dijadikan pendukung, tetapi bukan sebagai motor utama dalam upaya pembangunan di perbatasan tersebut misalnya lewat payung hukum Perpres/Inpres (Peraturan Presiden/Instruksi Presiden). Proposal membangun jalan Patroli Perbatasan dari ujung Kalbar hingga ujung Kaltara, dengan posisi 50 meter paralel dengan batas sempadan.

Selain itu perlunya penugasan khusus untuk Kementerian Ekonomi, Pariwisata dan Industri Kreatif juga Kementerian Desa, Pembangunan *Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*, untuk mengubah paradigma perbatasan yang serba terbatas menjadi ‘halaman depan Indonesia’ yang maju dan melimpah, sangat penting bagi warga kita di perbatasan, untuk merawat kebangsaan warga Long Nawang dan Krayan di Kalimantan Utara, agar bangga menjadi orang Indonesia dan juga Bank Indonesia untuk wajib menjaga agar mata uang rupiah menjadi alat tukar resmi yang berdaulat di halaman depan negara. Hal ini akan merupakan upaya nyata bagi Negara dalam membangun nasionalisme di halaman depan Indonesia di Long Nawang dan Krayan, Kalimantan Utara.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Indrawasih, Ratna Asfar Marzuki, Soewarsono, Sukri Abdurrachman. 1996. *Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Desa Entikong-Kalimantan Barat dan Pulau Nunukan-Kalimantan Timur*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. 2010. *Kabupaten Nunukan dalam Angka*. Nunukan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.
- Sedyawati, Edi dkk. 1995. *Konsep Tata Ruang Suku Bangsa Dayak Kenyah di Kalimantan Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Bappeda Kabupaten Malinau dan BPS Kabupaten Malinau. 2012. *Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau 2012*. Malinau: Bappeda Kabupaten Malinau dan BPS Kabupaten Malinau.

### Laporan dan Makalah

- Wawancara dengan Ketua Adat Krayan, berinisial YB, di Krayan, 29 Juni 2013.
- Wawancara dengan TSP, di Krayan, 27 Juni 2013.
- Wawancara dengan Frans Uktolseja, Pastor merangkap Kepala Urusan Pemerintahan Desa Long Betaoh, di Desa Long Betaoh, 5 Juni 2013.
- Wawancara dengan Lah Bilong, Kepala Desa Long Betaoh, di Desa Long Betaoh, 5 Juni 2013.
- Wawancara dengan Wilson Ului, Camat Kayan Hulu, di Desa Long Nawang, 4 Juni 2013.
- Wawancara dengan Kueng Jalung, Kepala Desa Long Nawang, di Desa Long Nawang, 4 Juni 2013.
- Wawancara dengan Nicke, seorang pelajar Sekolah Dasar, di Desa Long Nawang, 5 Juni 2013.
- Wawancara dengan Ngah, Warga Desa Long Nawang, di Desa Long Nawang, 5 Juni 2013.
- wawancara dengan Rum, Pemuda Desa Long Betaoh, di Long Betaoh, 5 Juni 2013.
- Wawancara dengan Tipa S. Padan, di Krayan, 27 Juni 2013.
- Wawancara dengan Damus Singa, MA, Anggota DPRD Nunukan Dapil Krayan, di Nunukan, 25 Juni 2013.
- Wawancara dengan nara sumber yang tidak ingin diungkap identitasnya di Krayan, 28 Juni 2013.
- Wawancara dengan Hengky Lalung Basar, Krayan, Juni 2013.
- Wawancara dengan Ir. Faridil Murad, tokoh masyarakat, di Nunukan, Juni, 2013.
- Wawancara dengan Lewi Gala, petani asal Krayan Hulu, di Krayan, 29 Juni 2013.
- Wawancara dengan Ingkong Ala, pedagang dan tokoh masyarakat Desa Long Nawang, di Long Nawang, 6 Juni 2013.
- Informasi Soni Soemarsono dalam *Focus Group Discussion*, di P2P LIPI, di Jakarta, 1 Oktober 2013.
- Informasi Dave Lumenta dalam FGD, di Pusat Penelitian Politik-LIPI, di Jakarta, 1 Oktober 2013.

### Surat Kabar dan Website

- “Budaya Dayak”, Bondan Winarno, *Kompas*, Rabu, 27 Agustus 2008.
- <http://www.bongkar.co.id/news/politik/664-kok-perbatasan-diurutan-10.html>.
- <http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Malinau/43915>.